

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU & TENAGA KERJA
TAHUN 2017-2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU & TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**MEI
2021**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan sasaran, strategi serta kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang akan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian dimasa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi karyawan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Liwa, Mei 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lampung Barat



EDI YUSUF, S.Sos, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19631027 198603 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| BABI PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA..... | 11 |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 11 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 16 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD | 24 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 26 |
| 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 26 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 29 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 31 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis..... | 33 |
| 3.5. Penentu Isu isu Strategis | 35 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 37 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah | 37 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 39 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 42 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 64 |
| BAB VIII PENUTUP | 67 |
| Lampiran-lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah dokumen perencanaan Manajerial Stratejik untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah.

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu : fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*) dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), temasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukan bahwa pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM, AK.1 (Kartu Pencari Kerja) dan lain-lain.

Dengan demikian,terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (Pelanggan).

Salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan usaha di Indonesia adalah birokrasi perizinan.Kondisi pelayanan perizinan masih dihadapkan pada sistem yang belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, terlihat dari banyaknya keluhan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai kinerja aparatur. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, sikap petugas yang kurang responsif, sarana yang kurang menunjang dan lain-lain menimbulkan citra kurang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lampung Barat pada hakekatnya merupakan salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pemberian sistem pelayanan perizinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Di Bidang Tenaga kerja masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan minimnya keterampilan pencari kerja , rendahnya kesempatan kerja belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja

dan penempatan tenaga kerja serta tidak tersedianya tenaga instruktur yang memiliki kompetensi sesuai standar Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Secara umum Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan serta tenaga kerja dimasyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Kinerja setiap akhir tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tatacara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
23. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD , serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah RPJMD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Vereifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang RPJMD 2017 – 2022;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;

32. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Renstra Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tahun 2017-2022 adalah untuk :

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 dengan Renstra Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2017 -

- 2022 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;
2. Memberikan pedoman dan Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala OPD. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan.

3.2.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.3.Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD provinsi

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun rencana

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat merupakan lembaga teknis Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kasubbag Umum dan Perencanaan
- d. Kasubbag Keuangan
- e. Bidang Penanaman Modal
- f. Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal
- g. Seksi Pengendalian dan Penanaman Modal
- h. Seksi Promosi dan Pengembangan Iklim Investasi
- i. Bidang Perizinan
- j. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- k. Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan
- l. Seksi Pengawasan , Penertiban dan Perizinan
- m. Bidang Ketenagakerjaan
- n. Seksi Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja
- o. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- p. Seksi Hubungan Industrial
- q. UPT Balai Latihan Kerja

a. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas serta melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas ;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelayanan administrasi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Dinas ;

Sekretariat Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas. Sekretariat Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Umum & Perencanaan dan Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanaman modal;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penanaman modal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal;

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

1. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
3. Seksi Promosi dan Pengembangan Iklim Investasi

d. Bidang Perizinan

Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang perizinan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang perizinan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di perizinan.

Bidang Perizinan terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Seksi Pengolahan dan Pemeriksaan
3. Seksi Pengawasan dan Penertiban Perizinan

e. Bidang Ketenagakerjaan

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas Bidang Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan;

- b. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketenagakerjaan.

Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :

- 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- 3. Seksi Hubungan Industrial

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPTD Balai Latihan Kerja
 - b. pelaksanaan pelatihan kerja dan uji keterampilan
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Balai Latihan Kerja
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja, dan
- pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan

UPTD BLK terdiri dari :

- 1. Kepala UPTD BLK
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tahun 2021 tercatat sebanyak orang yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 27 orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) = 12 orang

Tabel 2.1
Berdasarkan kepangkatan/golongan

| No | Golongan | Jumlah | Persentase |
|----|----------|--------|------------|
| 1 | IV | 6 | 22,22 % |
| 2 | III | 16 | 59,25 % |
| 3 | II | 5 | 18,53 % |

Tabel 2.2
Berdasarkan tingkat kependidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|------------|--------|------------|
| 1 | S.3 | 0 | 0 |
| 2 | S.2 | 6 | 22.22% |
| 3 | S.1 | 15 | 55.55% |
| 4 | D.III | 2 | 7.40% |
| 5 | SMA | 4 | 14.83% |
| 6 | SD | 0 | 0 |

Tabel 2.3
Berdasarkan Pendidikan Penyejangan

| NO | Pendidikan/Diklat | Jumlah | Persen |
|----|-------------------|--------|--------|
| 1 | SPAMEN/PIM II | 1 | 3,71 % |
| 2 | SPAMA / PIM III | 2 | 7,41 % |
| 3 | ADUM / PIM IV | 11 | 40,74% |
| 4 | BELUM PERNAH | 13 | 48,14% |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung pelayanan prima dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat adalah tersedia sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas diantaranya adalah :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

| NO | URAIAN | JUMLAH | KET |
|----|------------------|--------|---------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 2 | |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 9 | |
| 3 | Komputer | 9 | |
| 4 | Laptop | 3 | |
| 5 | Proyektor | 1 | |
| 6 | Mesin Tik | 2 | 1 Rusak |
| 7 | Meja Kerja | 25 | |
| 8 | Kursi | 23 | |
| 9 | Filing Kabinet | 5 | |
| 10 | Lemari Kayu | 2 | |
| 11 | Telepon | 1 | |
| 12 | Papan Pengumuman | 1 | |
| 13 | Sofa | 1 | |
| 14 | Kursi tunggu | 1 | |
| 15 | Meja fron office | 1 | |
| 16 | Meja Piket | 1 | |
| 17 | Absen Sidik Jari | 1 | |
| 18 | Brankas | 1 | |
| 19 | TV dan Parabola | 1 | |
| 20 | Gedung /Kantor | 1 Unit | |

1.3. Kinerja Pelayanan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 20 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Tabel 2.1

Daftar Pendeklegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat

| NO | JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN |
|--|---|
| URUSAN PERTANIAN | |
| 1. | Izin Usaha Budidaya Hortikultura |
| 2. | Izin Usaha Perbenihan Hortikultura |
| 3. | Izin Usaha Tanaman Pangan |
| 4. | Pendaftaran Usaha Perkebunan |
| 5. | Pendaftaran Usaha Peternakan |
| 6. | Izin Usaha Peternakan |
| 7. | Izin Usaha Perkebunan |
| 8. | Izin Usaha Rumah Potong Hewan |
| 9. | Izin Usaha Obat Hewan |
| 10. | Izin Usahan Veteriner |
| 11. | Izin Usaha Budidaya Hortikultura |
| 12. | Izin Usaha Perbenihan Hortikultura |
| URUSAN PARIWISATA | |
| 1. | Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan wisata |
| 2. | Tanda Daftar Usaha Penyedian Akomodasi |
| 3. | Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata |
| 4. | Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi wisata |
| 5. | Tanda Daftar Usaha Obyek dan Daya tarik Wisata (Usaha Pariwisata) |
| 6. | Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta |
| 7. | Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata |
| 8. | Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan Dan Minuman |
| 9. | Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan wisata |
| 10. | Tanda Daftar Usaha Penyedian Akomodasi |
| URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI | |

| | |
|--|--|
| 1. | Izin Pendirian/Pendaftaran Ulang Pengelolaan Tower Menara Telekomunikasi |
| URUSAN PERDAGANGAN | |
| 1. | Izin Usaha Toko Modern (IUTM) |
| 2. | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) |
| 3. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NIB |
| 4. | Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) |
| 5. | Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) |
| 6. | Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) |
| 7. | Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) |
| URUSAN PERINDUSTRIAN | |
| 1. | Izin usaha Industri (IUI), Kecil, Menengah, Besar |
| 2. | Izin perluasan industri |
| URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | |
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) |
| 2. | Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidaya Ikan |
| 3. | Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal |
| 4. | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan |
| URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | |
| 1. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) |
| 2. | Surat Izin Usaha Perikanan dibidang Pembudidaya Ikan |
| 3. | Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal |
| 4. | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan |
| URUSAN PERHUBUNGAN | |
| 1. | Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir |
| 2. | Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang |
| URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 1. | Izin Lingkungan |
| 2. | Rekomendasi SPPL |
| 3. | Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| 4. | Izin Pengumpulan Limbah B3 |
| 5. | Izin Pemanfaatan Air Limbah secara Aplikasi ke Tanah |
| 6. | Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan |
| 7. | Izin Pengangkutan Sampah |
| 8. | Izin Pengelolaan Sampah |
| 9. | Rekomendasi Izin Reklame |
| URUSAN PERTANAHAN | |
| 1. | Izin Lokasi |
| 2. | Izin Perubahan Penggunaan Tanah |
| URUSAN TENAGA KERJA | |
| 1. | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) |
| 2. | Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta |
| 3. | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) |
| 4. | Kartu Pencari Kerja (AK1) |
| 5. | Izin Operasional Penyediaan Tenaga Kerja Migran |
| 6. | Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran |

| | |
|---|--|
| 7. | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) |
| URUSAN SOSIAL | |
| 1. | Izin Pelayanan Pendirian Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Anak |
| 2. | Izin Pelayanan Kelompok Usaha Bersama Penyandang Cacat (PACA) |
| 3. | Izin Pelayanan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) |
| 4. | Izin Pelayanan Pengangkataan Anak |
| 5. | Izin Pelayanan Bantuan Musibah Korban Sosial dan Kebakaran |
| 6. | Izin Pelayanan Rekomendasi Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa |
| 7. | Izin Pelayanan Rekomendasi/ Surat Pengantar Pengumpulan Uang dan Barang |
| URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| 1. | Izin Mendirikan Bangunan (IMB) |
| 2. | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) |
| 3. | Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) |
| 4. | Izin Pengambilan Air Tanah |
| URUSAN KESEHATAN | |
| 1. | Izin Mendirikan Rumah Sakit |
| 2. | Izin Operasional Rumah Sakit |
| 3. | Izin Mendirikan Klinik |
| 4. | Izin Operasional Klinik |
| 5. | Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama |
| 6. | Izin Operasional Puskesmas |
| 7. | Izin Praktik Dokter |
| 8. | Izin Praktik Dokter Gigi |
| 9. | Izin Praktik Dokter Spesialis |
| 10. | Izin Praktik Apoteker |
| 11. | Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian |
| 12. | Izin Praktik Perawat |
| 13. | Izin Praktik Kesehatan Masyarakat |
| 14. | Izin Praktik Bidan |
| 15. | Izin Praktik Perawat Gigi/Terapis Gigi dan Mulut |
| 16. | Izin Praktik Fisioterapis |
| 17. | Izin Praktik Tenaga Gizi |
| 18. | Izin Praktek Radiografer |
| 19. | Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik |
| 20. | Izin Pranata Anestesi |
| 21. | Izin Kerja Tenaga Sanitarian |
| 22. | Izin Tukang Gigi |
| 23. | Izin Kerja Rekam Medis |
| 24. | Izin Apotek |
| 25. | Izin Toko Obat |
| 26. | Izin Toko Alat Kesehatan |
| 27. | Izin Optikal |
| 28. | Surat Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT |
| 29. | Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |
| 30. | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) |
| 31. | Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran |
| URUSAN PENDIDIKAN | |
| 1. | Izin Operasional Sekolah |

Untuk Tingkat Capaian Kinerja berdasarkan sasaran / target Renstra 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lampung Barat**

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke - | | | | | Realisasi capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|--|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|--------|------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Jumlah Aparatur yang bersertifikat Perizinan | | | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Jumlah Izin yang diproses secara online | | | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Pengaduan perizinan yang ditindaklanjuti | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Rata-rata proses perizinan | | | - | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase PAD yang direalisasikan | | | - | 80 % | 90 % | 100% | 100% | 100% | | 180% | 117% | 171% | 147 % | | 180% | 117% | 171% | 147 % |
| 6 | Rasio Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan | | | - | - | - | - | - | - | 0,038 % | 0 | 0 | 0 | 0,038% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelayanan BKOL | | | - | - | - | - | - | - | 0,32 % | 0 | 0 | 0 | 0,72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 1
Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Lampung Barat

| Tahun | Uraian | PMDN | PMA | Total |
|-------|-----------------|------|-----|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5=3+4) |
| 2013 | Jumlah Investor | 7 | - | 7 |
| 2014 | Jumlah Investor | 2 | - | 2 |
| 2015 | Jumlah Investor | 2 | - | 2 |
| 2016 | Jumlah Investor | 2 | - | 2 |
| 2017 | Jumlah Investor | 3 | - | 3 |

Tabel 2
Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Lampung Barat

| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
|-------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi | Jumlah Proyek | Nilai Investasi |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | 7 | Rp. 508.349.000.000 | 6 | Rp.4.667.204.246 |
| 2015 | 2 | Rp. 7.150.000.000 | 1 | Rp. 550,000,000 |
| 2016 | 2 | Rp. 680.233.769.610 | 1 | Rp. 0 |
| 2017 | 3 | Rp. 3.858.846.773.888 | 1 | Rp.3.167.204.246 |

Tabel 3
Jumlah Investor PMDN / PMA tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Lampung Barat

| NO | Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1 | Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN | - | 35 | 20 | 0 | 7 |
| 2 | Jumlah seluruh PMA/PMDN | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Rasio daya serap Tenaga Kerja | - | - | - | - | - |

Tenaga Kerja

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 – 2017

| NO | TAHUN | TPAK (%) | KETERANGAN |
|----|-------|------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2012 | 84,00 | Sumber data : - BPS Kab. LB |
| 2 | 2013 | 78,28 | - RPJMD Kab LB |
| 3 | 2014 | 74,71 | |
| 4 | 2015 | 74,06 | |
| 5 | 2016 | 74,71 | |
| 6 | 2017 | 80,78 | |

b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran

Tabel Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2012 – 2017

| NO | TAHUN | TPT (%) | KETERANGAN |
|----|-------|-----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2012 | 2,29 | Sumber data : - BPS Kab. LB |
| 2 | 2013 | 2,52 | - RPJMD Kab LB |
| 3 | 2014 | 2,18 | |
| 4 | 2015 | 3,55 | |
| 5 | 2016 | 3,55 | |
| 6 | 2017 | 0,96 | |

1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya perubahan nomenklatur dari Kantor menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhadap pelaksanaan pelayanan akan lebih optimal sehingga akan menjadi tantangan untuk lebih bekerja keras lagi dan berkomitmen terhadap tupoksi Dinas. Tantangan lain yaitu kesiapan terhadap pasar bebas, Percepatan Pemberian izin dan non izin serta pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan.

Adapun peluang pengembangan penanaman modal sebagai daerah kabupaten yang memiliki luas Daerah ± 2.142,78 km² dengan jumlah penduduk 295.689 dengan potensi unggulan disektor primer perkebunan, tanaman pangan, peternakan ,perikanan. Sector sekunder industry makanan, kopi serta sector tersier (Listrik, gas, air, perdagangan, reparasi,jasa dll) yang tersebar di 15 Kecamatan sangat strategis untuk dikembangkan dan ditawarkan kepada investor sehingga diharapkan peningkatan minat investasi terutama terhadap potensi unggulan (Kopi) di Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya investasi di Lampung Barat diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Langkah strategis dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Melaksanakan promosi peluang investasi unggulan Kabupaten Lampung Barat di Tingkat Nasional;
- b. Optimalisasi pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah transparan dan pasti.
- c. Penyusunan Master Plan / Peta Potensi Investasi Kabupaten Lampung Barat

Sedangkan langkah strategis untuk meningkatkan kesempatan kerja antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan;
- b. Peningkatan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dihadapkan pada permasalahan- permasalahan sebagaimana table T-B.35 berikut :

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan terhadap masayarakat | Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan). | Terbatasnya Kualitas serta Kuantitas Sumber Daya Aparatur SOP dan Standar pelayanan masih belum up to date |
| | | | Fasilitas pelayanan yang belum memadai dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public : 1. Belum tersedianya dukungan kendaraan operasional guna kunjungan lapangan dalam rangka permohonan izin dan pengawasan perizinan yang melibatkan Tim Teknis Perizinan; 2. Ruang layanan belum sesuai dengan standar Permendagri 138 Tahun 2017 |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| | | | Perubahan peraturan yang cepat |
| | | | Tim Teknis (Survey) yang melibatkan beberapa OPD (Jadwal Survey) |
| | | Belum tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan | Paradigma perizinan yang sulit,lambat, mahal dan tidak tepat waktu Perlu peningkatan intensitas sosialisasi perizinan |
| 2 | Nilai Investasi yang rendah | Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Lampung Barat | Jarak tempuh ke provinsi yang jauh; Data peluang investasi masih belum up to date. Intensitas promosi peluang investasi masih rendah |
| 3 | Tingkat Kesempatan kerja | Terbatasnya Lapangan Pekerjaan | Tingkat Pendidikan Masyarakat yang rendah |
| | | Terbatasnya kesempatan kerja | Minimnya keterampilan pencari kerja |
| | | Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal | -Belum terpenuhinya kebutuhan instruktur - Sarana & Prasarana BLK yang terbatas |

Berdasarkan table di atas permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan) dikarenakan terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang belum

memadai, Tim Teknis (Survey) yang melibatkan beberapa OPD (Survey menyesuaikan waktu/jadwal tim teknis)

dalam mendukung upaya peningkatan pelayanan public Permasalahan ini harus diantisipasi dan ditemukan solusi permasalahannya yaitu dengan :

- a. Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan diselenggarakan sesuai standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada dan berlaku;
 - b. Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang applicable dan accesible sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c. Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah kompeten dan profesional;
 - d. Tersedianya data potensi dan eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.
2. Belum tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dan non perizinan dikarenakan paradigma perizinan yang sulit,lambat, mahal dan tidak tepat waktu . Dari data yang ada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus perizinan masih cukup rendah sehingga permasalah ini dapat diantisipasi melalui kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan non perizinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada melalui brosur, pamphlet ataupun media lainnya.
 3. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi ke Lampung Barat dikarenakan jarak tempuh yang jauh dari provinsi
 4. Terbatasnya lapangan pekerjaan dikarenakan tingkat Pendidikan Masyarakat yang rendah,
 5. Masih rendahnya kesempatan kerja yang disebabkan minimnya keterampilan pencari kerja
Dalam mengatasi masalah ini Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga kerja melaksanakan kegiatan pelatihan – pelatihan seperti pelatihan otomotif, pelatihan menjahit, pelatihan sablon serta pelatihan kewirausahaan.

6. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) secara optimal dikarenakan terbatasnya sarana dan prasana BLK serta tidak adanya instruktur pelatih.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Berdasarkan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat, visi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu :

**“ TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN
SEJAHTERA”**

Hebat dalam arti Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman dan Taqwa dengan makna visi mengoptimalkan potensi yang ada dan sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Barat.

Visi tersebut dijabarkan dalam 5 (Lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat cerdas dan berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, serta kesetaraan gender dan partisipatif.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mendukung di 3 (Tiga) Misi yaitu :

1. Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro wisata berbasis sumber daya lokal
Tujuan 3.14 yaitu meningkatnya nilai investasi dengan sasaran OPD yaitu meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat

2. Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik
Tujuan meningkatnya kualitas layanan pemerintah kabupaten Lampung Barat dengan sasaran OPD yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu.
3. Misi 5 : Mengembangkan prikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan parsipatif
Tujuan menurunnya pengangguran dengan sasaran OPD yaitu meningkatnya kesempatan kerja.

Melalui visi “ **Terwujudnya Lampung Barat Hebat dan Sejahtera** ” sesuai dengan Misi 3, Misi 4 dan Misi 5 yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta 7 (Tujuh) Program membangun di Program 6 (Enam) Program Masyarakat Berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan public yaitu “ Pelayanan public yang mudah, cepat, tepat,murah/gratis dan transparan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja memiliki issu dalam pelayanan SKPD seperti :

- Paradigma perizinan yang sulit,lambat, mahal dan tidak tepat waktu
- Rendahnya nilai investasi di Lampung Barat,
- Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja
- Rendahnya kompetensi tenaga kerja

Permasalahan pokok diatas memerlukan pemikiran Bersama antara pemerintah daerah dan seluruh OPD yang terkait dalam menuntaskan masalah tersebut. Dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja telah mengarahkan program kegiatan , strategi serta arah kebijakan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah agar dapat menimbulkan permasalahan seperti :

1. Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik
- 2.Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan investasi, menjaga iklim investasi yang kondusif sera kolaborasi pendanaan pembangunan
- 3.Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam mengimplementasikan pelayanan prima.

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simflikasi, keamanan dan kepastian pelayanan adminstrasi perizinan;
6. Meningkatkan Komitmen Pimpinan Daerah dan OPD Terkait serta dukungan Stakeholder Lain (DPRD), Pelaku Usaha dan masyarakat.
7. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja telah terakomodir dalam RPJMD kabupaten Lampung Barat Serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Data peluang investasi yang belum update;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik sesuai dengan standard pelayanan;
3. Standard pelayanan dan SOP yang belum update;
4. Masih terdapat perizinan dan non perizinan yang belum terpadu dalam Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Provinsi Lampung;
5. Belum tercukupinya sumberdaya aparatur penanaman modal dan perizinan yang kompeten.

Untuk itu pada tahun periode 2015-2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung akan melakukan :

1. Peningkatan kebijakan pengembangan penanaman modal berbasis kewilayahannya dan potensi daerah;

2. Fasilitasi peningkatan pelayanan penanaman modal, antara lain melalui percepatan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di seluruh kabupaten/kota serta penetapan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal;
3. Melakukan penyeragaman Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
4. Promosi potensi daerah, antara lain peningkatan promosi penanaman modal yang lebih intensif, terintegrasi, terpadu dan terfokus, di dalam dan luar negeri, dengan melibatkan sektor-sektor unggulan daerah, usaha kecil dan menengah, melakukan penyebarluasan potensi penanaman modal daerah-daerah melalui media cetak dan elektronik yang berskala nasional;
5. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penanaman modal di daerah antara lain pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, maupun kemampuan dalam berbahasa.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat 2017-2022, Prioritas pembangunan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja diarahkan pada :

1. Program peningkatan pelayanan perizinan
2. Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha
3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
4. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030 adalah :

1. Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) WKP Suoh – Sekincau
2. Kawasan Hutan Tanaman Rakyat pada Kawasan HPT

Sedangkan untuk Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi
 - a. Kawasan Agropolitan Way Tenong
 - b. Kawasan Agroteknopark di Kecamatan Sumber Jaya
 - c. Kawasan Agrominapolitan di Danau Ranau
2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup
 - a. Kawasan Geopark
 - b. Kebun Raya Liwa
 - c. TNBBS
3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya
 - a. Desa Konservasi di Kecamatan Balik Bukit
 - b. Cagar Budaya Kenali di Kecamatan Batu Brak
 - c. Cagar Budaya di Kecamatan Lumbok Seminung
4. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan / atau Teknologi Tinggi
 - a. PLTP Sekincau
 - b. PLTP Danau Ranau

Berdasarkan analisis RTRW dan KLHS diharapkan dapat menjadi informasi dan daya Tarik investor untuk berinvestasi mengembangkan Kawasan terpadu di atas

SWOT (Strengthts, Weaknesses, Opportunity, Threats) analisis analisis adalah proses assessment yang subjektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi factor – factor strategis yang berupa kekuatan dan kelemahan serta factor peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (Strength)

- Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.

b. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya sumber daya aparatur
- Belum Optimalnya pelayanan perizinan secara online
- Data Peluang investasi belum up to date
- Sarana dan Prasarana yang terbatas
- Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja

c. Peluang (Opportunity)

- Adanya kebijakan nasional untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dengan pelayanan terpadu satu pintu;
- Banyaknya penawaran pengembangan sumber daya manusia berupa diklat dan bimtek baik dari Lembaga / departemen maupun non departemen/swasta;
- Tersedianya tim teknis untuk mendukung pelayanan
- Kebijakan iklim investasi nasional yang kian membaik
- Adanya potensi daerah yang potensial untuk dikembangkan
- Dukungan Forum PTSP.
- Tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK)
- Tingginya jumlah usia angkatan kerja

d. Tantangan (Threat)

Tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat menganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat sedangkan Ancaman merupakan kondisi eksternal yang tidak dapat dikendalikan.Tantangan dan ancaman tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis Kabupaten Lampung Barat;
2. Perubahan peraturan yang cepat
3. Masih adanya persepsi negatif terhadap kelembagaan PTSP;
4. Terbatasnya lapangan pekerjaan;
5. Kurangnya Kesempatan Kerja,Lapangan Pekerjaan bagi pencari kerja dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah.

3.5. Penentu Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka disimpulkan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Promosi dan kerja sama instansi dalam rangka menarik Investasi
2. Akses dan potensi daerah yang belum terkelola dengan baik
3. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis
4. Kurangnya / masih rendahnya peluang kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja
5. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
6. Masih Perlunya kemitraan dengan dunia usaha
7. Belum Optimalnya perlindungan tenaga kerja

Faktor kekuatan/peluang, kelemahan / tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul dikemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan disusun faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dan penguatan Kelembagaan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat ;
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja agar menjadi profesional ;
3. Adanya peraturan perUndang-Undangan mengenai pelayanan publik dan peraturan pelaksanaan dalam bidang perizinan.
2. Adanya inovasi yang terus menerus dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan ;
3. Dukungan sumber dana yang memadai ;
4. Adanya perumusan dan penerapan kebijakan pelayanan perizinan yang konsisten.
5. Adanya koordinasi dan sinkronisasi antara jejaring kerja pelayanan perizinan dengan pemangku kepentingan, dari instansi pemerintah dan masyarakat, untuk mewujudkan pelayanan prima.
6. Adanya inovasi-inovasi dalam menarik investor baik melalui promosi,penyeleggaraan klinik investasi.
7. Adanya Pendidikan/pelatihan-pelatihan bagi pencari kerja, serta pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan wirausaha baru.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan , berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Menurunnya Pengangguran;

Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Meningkatnya Kesempatan Kerja;

Tujuan , Sasaran dan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Meningkatnya Nilai Investasi | Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat | Nilai Investasi | Rp. 3.325.564.458 | Rp. 3.491.842.681 | Rp. 3.666.434.815 | Rp. 3.849.756.556 | Rp. 4.042.244.384 |
| | | | Jumlah Investasi PMDN/PMA | Rp. 3.325.564.458 | Rp. 82 M | Rp. 85 M | Rp. 90 M | Rp. 95 M |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan pemerintah Kabupaten Lampung Barat | Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 0 | C | C | C | C |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | B | B |
| 3. | Menurunnya Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,90% | 0,85% | 0,80% | 0,75% | 0,71% |
| | | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 80,80 % | 80,84% | 80,89% | 80,92% | 80,95% |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah /Perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi & Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel berikut :

| Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan VISI : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA | | | |
|--|--|--|--|
| MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian yang Berorientasi pada Agro- Bisnis dan Agro-Wisata Berbasis Sumberdaya Lokal | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Sasaran 3.1.5 Meningkatnya Nilai Investasi | Meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat | Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi, Menjaga iklim investasi yang kondusif serta kolaborasi pendanaan pembangunan Penyusunan Peta Potensi Investasi | Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerja sama ; |

MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Amanah dengan berorientasi pada Pelayanan Publik

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Sasaran 4.1.3 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemkab Lampung Barat | Meningkatnya kualitas Pelayanan perizinan terpadu | Meningkatnya Kinerja & Efektivitas Pelayanan Publik Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan | Menguatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan |

MISI 5 : Mengembangkan Priehidupan Masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis,kesetaraan gender & partisipatif

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|--|-------------------------------|---|---|
| Sasaran 5.1.5 Menurunnya Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja | Peningkatan kualitas sumber daya manusia/tenaga kerja Peningkatan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan perlindungan tenaga kerja,keselamatan dan kesehatan kerja |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai tugas dan fungsi.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

| SASARAN 1 | INDIKATOR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya jumlah investasi di Lampung Barat | Jumlah Investasi PMDN/PMA | Rp.3.325.564.458 | Rp.80 M | Rp.85 M | Rp. 90 M | Rp. 95 M |

Program serta kegiatan yang menunjang sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|---|-------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | | | Urusan Penanaman Modal | | | | | |
| 2 | 2 | | | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | Persentase Investor yang merealisasikan Investasi | 70% | 75% | 85% | 90% |
| 0 | 1 | 1 | 6 | Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal | Jumlah Peta Potensi Investasi | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Penyelenggaraan layanan klinik investasi | Jumlah layanan klinik investasi | 12 Bulan | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 10 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah laporan pengawasan pengendalian penanaman modal | 4 Lap. | 4 Lap. | 4 Lap. | 4 Lap. |
| 2 | 2 | 6 | 11 | | | | | | |

| | | | | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|----------------|----------------|--------------------------|----|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KODE | | Program/ Kegiatan | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 12 | Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | Jumlah layanan SPIPISE | 3 Kali | 3 Kali | 0 | 0 |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 13 | Promosi Peluang Investasi | Jumlah pelaksanaan pameran promosi dan investasi daerah | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali | 2 Kali |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 15 | Penyelenggaraan layanan klinik investasi dan Foila | Jumlah Investor/Pelaku Usaha Yang didampingi | 0 | 80 Pelaku Usaha | 100 Pelaku Usaha | 120 Pelaku Usaha |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 16 | Pelayanan Informasi Investasi secara elektronik | Jumlah penerbitan Nomor izin berusaha | 0 | 80 izin | 100 izin | 120 izin |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 17 | Penyusunan data investasi dan realisasi perizinan | Jumlah dokumen data investasi dan realisasi perizinan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 18 | Pekan Raya Lampung | Jumlah Pelaksanaan Pekan Raya Lampung | 0 | 0 | 1 Kali | 1 Kali |
| 0 2 | 1 2 | 1 6 | 19 | Liwa Fair | Jumlah Pelaksanaan Liwa Fair | 0 | 0 | 1 Kali | 1 Kali |

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|---|-------------------|--|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | Urusan Penanaman Modal | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | Program pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi penanaman modal | 100% | 100% | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | Penyusunan data investasi dan realisasi perizinan | Jumlah dokumen data investasi dan realisasi perizinan | 1 dok. | 1 Dokumen | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 01 | Pemeliharaan dan Operasional website | Jumlah pengunjung website | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 02 | Fasilitasi investasi dan Informasi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Penanaman Modal | 2 Dok | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 03 | Sosialisasi RUPM | Jumlah peserta sosialisasi | 0 | 100 Orang |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 06 | | | 0 | 0 |

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

| Uraian Renstra | Output Renstra | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Program : PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Dokumen Pengembangan Iklim Penanaman Modal (investasi) | | | | | | |
| Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Fasilitas / Insentif Penanaman Modal | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | jumlah dokumen penetapan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi Penanaman Modal | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Jumlah Peta Potensi Investasi | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen |
| Program : PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Unit Usaha Baru | | | | | | |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Promosi Penanaman Modal | 2 Event | 2 Event | 0 Event | 2 Event | 2 Event |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen |
| Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Promosi Penanaman Modal | 2 Event | 2 Event | 0 Event | 2 Event | 2 Event |
| Program : PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Realisasikan Investasi | | | | | | |
| Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Percentase Pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan terkait perizinan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 10 kali | 5 kali |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | 162 Orang | 162 Orang | 162 Orang | 234 Orang | 120 Orang |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Pengawasan Penanaman Modal | 9 kali | 9 kali | 10 kali | 20 kali | 10 kali |
| Program : PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | | | | | | |
| Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | 1 Dokumen |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Junlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | 45 Eksemplar |

| SASARAN 2 | INDIKATOR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan terpadu | Indeks Kepuasan Masyarakat | B | B | B | B | B |

Adapun Program serta kegiatan yang menunjang sasaran pada tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD serta program kegiatan sbb :

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|-------------|----------|----------|--------------------------|---|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | | Urusan Penanaman Modal | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit sesuai standar dengan layanan | 75 % | 75 % | 80 % |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 02 | Operasional Pelayanan Izin | Jumlah izin yang terbit | 400 Ijin | 400 Ijin | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 06 | Pengembangan Pelayanan Online | Jumlah fitur yang dikembangkan | 2 Fitur | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 07 | Datang Investasi Langsung Konstruksi (Diskon) | Jumlah layanan diskon | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 08 | Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan | Jumlah lokasi pemutihan IMB | 3 Kec | 3 Kec | 3 Kec. |
| 0 | 2 | 1 | 9 | 09 | Operasional Tim Kerja Teknis perizinan Kabupaten Lampung Barat | Jumlah survey perizinan | 400 Izin | 400 Izin | 0 Izin |
| | | | | | | | | | |

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|--------|--------|--------|-------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 11 | Operasional Satgas percepatan berusaha | Jumlah peraturan perizinan | 0 | 1 dok | 1 dok | 1 dok |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 12 | Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan | 0 | 15 Kec | 15 Kec | 15 Kec |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 13 | Pelayanan Perizinan | Jumlah izin yang terbit | 0 Izin | 0 izin | 400 izin | 400 Izin |
| | | | | | | | | | |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 14 | Survey Tim Teknis | Jumlah survey perizinan | 0 | 0 | 400 Ijin | 400 Ijin |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 15 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan izin usaha | Jumlah laporan monev | 0 | 0 | 4 Laporan | 4 Laporan |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 16 | Rapat koordinasi perizinan | Jumlah rapat koordinasi perizinan | 0 | 0 | 4 Kali | 4 Kali |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 17 | Sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat | Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi | 0 | 0 | 5 Lokasi | 5 Lokasi |
| 0 2 | 1 2 | 1 9 | 18 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Jumlah Laporan Survey IKM | 0 | 0 | 0 | 2 Laporan |

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|---|------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 1 | 2 | Urusan Penanaman Modal | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 9 | Program Monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha | Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan terkait perizinan | 20 % | 25 % | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 19 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan izin usaha | Jumlah laporan monev | 4 Laporan | 4 Laporan | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 19 | 02 | Rapat koordinasi perizinan | Jumlah rapat koordinasi perizinan | 4 Kali | 4 Kali | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 19 | 05 | Sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat | Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 0 |
| 0 | 1 | 2 | 19 | 08 | Inventarisasi data izin mendirikan bangunan (IMB) | Jumlah laporan data IMB | 1 Laporan | 1 Laporan | 0 |

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

| Uraian Renstra | Output Renstra | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Program : PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan standar layanan | | | | | | |
| Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Perizinan dan non perizinan yang terbit | 400 izin | 400 izin | 400 izin | 400 izin | 400 izin |
| Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah permohon perizinan yang dilayani | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang | 400 Orang |
| Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | Jumlah Survei Perizinan | 400 Survey Perizinan | 400 Survey Perizinan | 400 Survey Perizinan | 51 Survey Perizinan | 280 Survey Perizinan |
| Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
| Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan | | | | | | |
| Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen | 22 Dokumen |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah RKA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah RKA Perubahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah DPA Perubahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 4 Dokumen |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 10 Dokumen |
| Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun | 3 Dokumen |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya | 26 Orang |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | 1 Dokumen |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun | 1 Dokumen |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 1 Dokumen |
| Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi Kepegawaianya | 2 Orang |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 2 Orang |
| Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah sub organisasi yang disediakan Administrasi Umumnya | 4 Sub Organisasi |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan | 10 Jenis |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 Jenis |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan | 7 Jenis |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum) | 4 SKHU | 4 SKHU | 4 SKHU | 5 SKHU | 5 SKHU |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu | 12 Kali |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan | 30 kali |
| Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang diadakan | 4 Unit | 3 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 1 Unit | 25 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 2 Set |
| Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Sub Organisasi |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar | 1127 Surat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening/ID Pelanggan | 4 Rekening |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum kantornya | 4 Sub Organisasi |
| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraannya | 11 Kendaraan |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya dan Pajak Kendaraanya | 11 Kendaraan |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 8 Unit |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 2 Gedung |

| SASARAN 3 | INDIKATOR | TARGET 5 TAHUN | | | | |
|-------------------------------|---|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 80,80 % | 80,84 % | 80,89 % | 80,92 % | 80,95 % |

Program serta Kegiatan yang menunjang sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Penyusunan Program dan Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|--------|--------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 02 | 0 1 | | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | |
| 02 | 0 1 | 1 5 | Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja | Persentase Pencari Kerja yang terdaftar dan mendapatkan pekerjaan | 0 | 25% | 30 % | 35 % | 40% |
| | | | | Persentase lulusan pelatihan yang bekerja | 50% | 60% | 60 % | 65 % | 70 % |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 06 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | Jumlah peserta yang terlatih menjahit dan otomotif | 60 Orang | 80 Orang | 116 Orang | 120 Orang |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 15 | Pelatihan kewirausahaan | Jumlah peserta pelatihan | 0 | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 3 Kelompok |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 16 | Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK | Jumlah peralatan pelatihan Menjahit,Otomotif,kopi Serta Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga | 1 Set | 0 Set | 0 Set | 0 Set |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 17 | Pelatihan Sablon | Jumlah peserta pelatihan sablon | 15 Orang | 20 Orang | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----|--|---|---|--------|----------|----------|----------|
| 02 | 0 1 | 1 5 | 18 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja | Jumlah peralatan pelatihan menjahit, otomotif ,kopi serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga | 0 | 10 set | 10 set | 10 set | 10 Set |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 20 | Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | 0 | 0 | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 02 | 0 1 | 1 5 | 21 | Pelayanan dan Perlindungan TKI | Jumlah rekom ID CMI yang terbit | 0 | 0 | 30 Rekom | 30 Rekom | 35 Rekom |

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|-------------|--------|--------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 2 1 | | | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | |
| 0 2 1 | 0 1 | 1 5 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Percentase pencari kerja yang terdaftar dan terserap di lapangan pekerjaan | 20 % | 25 % | 0 | 0 | 0 |
| 0 2 1 | 0 1 | 1 5 | 02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja | Jumlah bulan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | 12 Bulan | 12 Bulan | 0 | 0 | 0 |
| 0 2 | 0 1 | 1 5 | 09 Pelayanan dan Perlindungan TKI | Jumlah rekom ID CMI yang terbit | 25 Rekom | 25 Rekom | 0 | 0 | 0 |
| 0 2 | 0 1 | 1 5 | 10 Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah peserta pelatihan | 1 Kelompok | 0 | 0 | 0 | 0 |

| KODE | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|---|---|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | |
| 2 | 1 | | Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan kesehatan kerja (K3) | 12% | 16% | 22 % | 32% | 41% |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | Persidangan, pertemuan (LKS tripartit, Tim Deteksi Dini, Dewan Pengupahan) | Jumlah pertemuan / persidangan | 6 Kali | 0 | 0 |
| 2 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | Pemutakhiran Data Tenaga Kerja Formal; / Informal | Jumlah dokumen profil tenaga kerja | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| 2 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | Pelayanan dan Perlindungan TKI | Jumlah rekom ID CTKI yang terbit | 20 Rekom | 0 | 0 |
| 2 | 1 | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | Monitoring dan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja | Jumlah monitoring dan perlindungan terhadap keselamatan kerja | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali |
| 2 | 1 | | | | | | | | |

| | | | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program(outcome)/ Indikator Kinerja (Output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|--------|--------|--------|-------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KODE | | | | | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 2 | 0 1 | 1 5 | 16 | Operasional penetapan dan sosialisasi UMK | Jumlah Peserta Sosialisasi | 0 | 45 Orang | 1 dok | 1 dok |
| 0 2 | 0 1 | 1 5 | 17 | Penetapan dan Sosialisasi UMK | Jumlah Peserta Sosialisasi | 0 | 0 | 75 Orang | 75 Orang |

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengalami penyesuaian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

| Uraian Renstra | Output Renstra | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | |
| Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja | | | | | | |
| Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 6 Jenis |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Peserta Pelatihan | 60 Orang | 80 Orang | 100 Orang | 50 Orang | 50 Orang |
| Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang tersedia | 10 Jenis |
| Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan | | | | | | |
| Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kartu Antar Kerja (AK1) yang diterbitkan | 900 Kartu | 1000 Kartu | 1200 Kartu | 1250 Kartu | 1300 Kartu |
| Pelayanan antar Kerja | Jumlah AK 1 Yang terbit | 900 Kartu | 1000 Kartu | 1200 Kartu | 1250 Kartu | 1300 Kartu |
| Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja | 4 Media |
| Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan | 36 Lowong Pekerjaan |
| Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi PMI | 5 Kali |
| Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah rekom ID Calon Migran Indonesia yang terbit | 25 Rekom | 25 Rekom | 30 Rekom | 30 Rekom | 35 Rekom |
| Program : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Perusahaan yang menerapkan Keselamatan,Kesehatan Kerja (K3) | | | | | | |

| Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Monev Perusahaan yang Beroperasi di lampung Barat | 15 Perusahaan |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dapat diselesaikan | 2 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus |
| Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan | 1 Dokumen |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan UMK | 1 Dokumen |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Sasaran Strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan , dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur sehingga sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator Sasaran / Kinerja Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian strategi 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investasi PMDN/PMA;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022 ini berisi pedoman pelaksanakan pembangunan dan ketentuan-ketentuan lain yang perpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 – 2022 yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Diharapkan dapat tercapai sasaran yang efektif dan efisien, secara sinergi sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menjadi kenyataan sesuai dengan harapan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis dalam

proses pembangunan tersebut sejauh tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas program antar bidang, antar instansi/lembaga terkait dalam membangun investasi di Lampung Barat yang memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat Lampung Barat khususnya dan kemajuan bangsa Indonesia secara umum.

Keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program lima tahunan ini atau biasa disebut Renstra ditentukan oleh kerjasama yang mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan perencanaan program khususnya para pemangku kepentingan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada tabel :

| No | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD | Target Capaian setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|---|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | Tahun I | Tahun 2 | Tahun 3 | Tahun 4 | Tahun 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jumlah Investasi PMDN/PMA | 3.167.204.246 | 3,3 M | 80 M | 85 M | 90 M | 95 M | 95 M |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 80,80 % | 80,78% | 80,80% | 80,89% | 80,92% | 80,95% | 80,95% |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA YANG TERCANTUM DALAM RPJMD

TAHUN 2018 - 2022

| No | SASARAN | INDIKATOR KERJA | SATUAN | PENJELASAN | | TARGET | | | | |
|----|---|---|----------|---|------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatnya Jumlah Investasi di Lampung Barat | Jumlah Investasi PMDN/PMA | Rupiah | Jumlah Realisasi Investasi | DPM,PTSP & Naker | 3.325.564.458 | 82 M | 85 M | 90 M | 95 M |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat | $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | DPM,PTSP & Naker | B | B | B | B | B |
| 3 | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | % | $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 Tahun ke atas}} \times 100\%$ | DPM,PTSP & Naker | 80,80% | 80,84% | 80,89% | 80,92% | 80,95% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat.

Rencana strategis memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan penanaman modal, pelayanan perijinan serta tenaga kerja untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2017-2022.

Dalam pelaksanaannya dokumen ini berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan program kegiatan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja selama 5 (lima) tahun mendatang;
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal, pelayanan perijinan serta sebagai acuan penyusunan rencana strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal, pelayanan perijinan serta tenaga kerja di Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Mei 2021

**Kepala Dinas
Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lampung Barat**



EDI YUSUF,S.Sos,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19631027 198603 1 009

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN RENSTRA TAHUN 2018-2022
PERMENDAGRI 13/2006

DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|--|--|--|--|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| 00 | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 01 | Non Urusan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 01 001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | pelayanan administrasi tepat waktu | 12 Bulan | 12 Bulan | 424.678.400 | 12 Bulan | 346.705.000 | 12 Bulan | 394.576.050 | 12 Bulan | 448.947.950 | 12 Bulan | 511.270.200 | 60 Bulan | 2.126.177.600 | | Balik Bukit | | |
| 00 01 001 001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat | Jumlah waktu layanan administrasi surat menyurat | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.000.000 | 12 Bulan | 4.600.000 | 12 Bulan | 5.290.000 | 12 Bulan | 5.819.000 | 12 Bulan | 6.400.900 | 60 Bulan | 26.109.900 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |
| 00 01 001 002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | terlaksananya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | jumlah waktu layanan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 19.800.000 | 12 Bulan | 18.480.000 | 12 Bulan | 20.328.000 | 12 Bulan | 22.360.800 | 12 Bulan | 24.596.000 | 60 Bulan | 105.564.800 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | liwa | | |
| 00 01 001 006 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional | jumlah kendaraan dinas yang memiliki perizinan lengkap | 2 mobil 9 motor Unit | 2 mobil 9 motor Unit | 4.250.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 4.675.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 5.142.500 | 2 mobil 9 motor Unit | 5.656.750 | 2 mobil 9 motor Unit | 6.222.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 25.946.250 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |
| 00 01 001 007 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah administrasi keuangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 500.000 | 2 Jenis | 575.000 | 2 Jenis | 632.500 | 2 Jenis | 695.750 | 2 Jenis | 765.000 | 2 Jenis | 3.168.250 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |
| 00 01 001 008 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah gedung yang terpelihara gedungnya | 1 Gedung | 1 Gedung | 7.804.200 | 1 Gedung | 8.584.000 | 1 Gedung | 9.442.400 | 1 Gedung | 10.386.000 | 1 Gedung | 11.424.600 | 1 Gedung | 47.641.200 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |
| 00 01 001 010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | terlaksananya penyediaan alat tulis kantor | Jumlah waktu penyediaan ATK | 12 Bulan | 12 Bulan | 16.197.500 | 12 Bulan | 11.000.000 | 12 Bulan | 12.100.000 | 12 Bulan | 13.310.000 | 12 Bulan | 14.641.000 | 60 Bulan | 67.248.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| 00 01 001 011 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 31.420.000 | 12 Bulan | 32.000.000 | 12 Bulan | 35.200.000 | 12 Bulan | 38.720.000 | 12 Bulan | 42.592.000 | 60 Bulan | 179.932.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|--|---|---|--|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|--------------------|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | |
| 00 01 001 012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah waktu penyediaan peralatan listrik | 12 Bulan | 12 Bulan | 2.551.000 | 12 Bulan | 2.806.000 | 12 Bulan | 3.086.000 | 12 Bulan | 3.394.000 | 12 Bulan | 3.733.000 | 60 Bulan | 15.570.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 001 015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | terlaksananya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | jumlah langganan surat kabar | 4 SKHU | 4 SKHU | 3.960.000 | 4 SKHU | 4.554.000 | 4 SKHU | 5.009.000 | 4 SKHU | 5.509.000 | 4 SKHU | 6.335.350 | 4 SKHU | 25.367.350 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 001 017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | terlaksanya kegiatan penyediaan makanan dan minuman | jumlah pelaksanaan rapat bulanan | 12 Bulan | 12 Bulan | 33.768.000 | 12 Bulan | 22.440.000 | 12 Bulan | 25.806.000 | 12 Bulan | 29.676.900 | 12 Bulan | 34.128.000 | 60 Bulan | 145.818.900 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 001 018 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 190.000.000 | 12 Bulan | 110.000.000 | 12 Bulan | 126.500.000 | 12 Bulan | 145.475.000 | 12 Bulan | 167.296.250 | 60 Bulan | 739.271.250 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Luar Lampung Barat |
| 00 01 001 020 | Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran | terlaksananya kegiatan penyediaan jasa propaganda/publikasi pameran | jumlah pameran yang diikuti | 1 Kali | 1 Kali | 10.000.000 | 1 Kali | 11.500.000 | 1 Kali | 13.225.000 | 1 Kali | 15.208.750 | 1 Kali | 17.490.000 | 5 Kali | 67.423.750 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 001 021 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah | terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah | Jumlah pelaksanaan pembinaan ke dalam daerah | 12 Bulan | 12 Bulan | 25.500.000 | 12 Bulan | 29.325.000 | 12 Bulan | 33.723.750 | 12 Bulan | 38.782.000 | 12 Bulan | 44.599.000 | 60 Bulan | 171.929.750 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 001 038 | Biaya Operasional Kantor UPTD | terlaksananya kegiatan operasional BLK | Jumlah bulan operasional BLK | 12 Bulan | 12 Bulan | 74.927.700 | 12 Bulan | 86.166.000 | 12 Bulan | 99.090.900 | 12 Bulan | 113.954.000 | 12 Bulan | 131.047.100 | 60 Bulan | 505.185.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 002 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur | ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 50 % | 10 % | 1.105.096.000 | 20 % | 427.137.700 | 30 % | 370.848.900 | 40 % | 407.932.750 | 50 % | 448.724.400 | 50 % | 2.759.739.750 | | |
| 00 01 002 005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | terlaksananya pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi | Jumlah mobil, motor | 0 Unit | 4 Unit | 698.100.000 | 3 Unit | 75.000.000 | 0 Unit | 0 | 0 Unit | 0 | 0 Unit | 0 | 3 Unit | 773.100.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|--|---|---|--|------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|----------------|--|---------------|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | |
| 00 01 002 007 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor | jumlah pengadaan gorden & perlengkapan gedung kantor, lemari arsip,locker | 0 Set | 1 Set | 22.500.000 | 3 Set | 20.614.000 | 1 Set | 22.675.400 | 1 Set | 24.942.000 | 1 Set | 27.436.000 | 1 Set | 118.167.400 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 002 009 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah pengadaan genset dan peralatan gedung kantor (Mesin Tik) | 0 Unit | 1 Unit | 27.000.000 | 3 Unit | 29.700.000 | 1 Unit | 32.670.000 | 1 Unit | 35.937.000 | 1 Unit | 39.530.700 | 7 Unit | 164.837.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 002 010 | Pengadaan Mebeleur | terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur | Jumlah Pengadaan Meja dan Kursi | 0 Unit | 1 Unit | 77.350.000 | 25 Unit | 85.085.000 | 10 Unit | 93.593.500 | 10 Unit | 102.952.850 | 10 Unit | 113.248.000 | 56 Unit | 472.229.350 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 011 | Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer | terlaksananya kegiatan pengadaan komputer/jaringan komputer | Jumlah Laptop , printer dan UPS | 1 komputer 1 UPS Unit | 1 laptop 1 Printer Unit | 24.000.000 | 1 laptop 1 Printer Unit | 13.607.700 | 1 laptop 1 printer Unit | 14.967.000 | 1 komputer 1 Printer Unit | 16.464.000 | 1 laptop 1 printer Unit | 18.110.000 | 5 unit 5 unit Unit | 87.148.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 014 | Pengadaan Alat-Alat Studio | terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat studio | Jumlah pengadaan kamera dan alat studio | 0 Unit | 1 Unit | 15.000.000 | 2 Unit | 10.000.000 | 1 Unit | 11.000.000 | 1 Unit | 12.100.000 | 1 Unit | 13.310.000 | 6 Unit | 61.410.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 022 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor terpelihara baik dan lanjutan pagar | 1 Gedung | 1 Gedung | 75.000.000 | 1 Gedung | 51.700.000 | 1 Gedung | 56.870.000 | 1 Gedung | 62.557.000 | 1 Gedung | 68.812.700 | 1 gedung dan lanjutan pagar Gedung | 314.939.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 024 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah pemeliharaan mobil dan motor | 2 mobil 9 motor Unit | 2 mobil 9 motor Unit | 126.336.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 113.999.500 | 2 mobil 9 motor Unit | 125.399.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 137.938.900 | 2 mobil 9 motor Unit | 151.732.000 | 2 mobil 9 motor Unit | 655.405.400 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 026 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | jumlah bulan pemeliharaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 10.810.000 | 12 Bulan | 12.431.500 | 12 Bulan | 13.674.000 | 12 Bulan | 15.041.000 | 12 Bulan | 16.545.000 | 60 Bulan | 68.501.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 00 01 002 071 | Pengadaan Alat - Alat Komunikasi | terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat komunikasi | jumlah facsimile / telepon | 0 Unit | 1 Unit | 4.000.000 | 0 Unit | 0 | 0 Unit | 0 | 0 Unit | 0 | 0 Unit | 0 | 1 Unit | 4.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|---|--|---|--|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|--------------------|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | |
| 00 01 002 098 | Belanja Modal Pengadaan Display | terlaksananya kegiatan belanja modal pengadaan display | jumlah neon box | 0 Set | 1 Set | 25.000.000 | 1 Set | 15.000.000 | 0 Set | 0 | 0 Set | 0 | 0 Set | 0 | 1 Set | 40.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 005 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | meningkatnya kualitas sumber daya aparatur | jumlah aparatuer yang meningkat kapasitasnya | 10 Orang | 1 Orang | 25.000.000 | 2 Orang | 11.500.000 | 2 Orang | 13.225.000 | 2 Orang | 15.208.000 | 2 Orang | 17.489.000 | 9 Orang | 82.422.000 | | Balik Bukit |
| 00 01 005 001 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | pendidikan dan pelatihan formal | jumlah ASN yang mengikuti diklat | 1 Orang | 1 Orang | 25.000.000 | 2 Orang | 11.500.000 | 2 Orang | 13.225.000 | 2 Orang | 15.208.000 | 2 Orang | 17.489.000 | 9 Orang | 82.422.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Luar Lampung Barat |
| 00 01 006 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD | Meningkatnya kualitas sistem pelaporan capaian kinerja | dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 96 Dokumen | 20 Dokumen | 141.300.000 | 10 Dokumen | 90.020.000 | 10 Dokumen | 102.621.500 | 10 Dokumen | 117.022.300 | 11 Dokumen | 163.483.750 | 61 Dokumen | 614.447.550 | | Balik Bukit |
| 00 01 006 001 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan tepat waktu | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000 | 1 Laporan | 1.150.000 | 1 Laporan | 1.265.000 | 1 Laporan | 1.391.500 | 1 Laporan | 1.530.650 | 5 Laporan | 6.337.150 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 006 002 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran | jumlah laporan keuangan semesteran tepat waktu | 2 Laporan | 2 Laporan | 1.000.000 | 2 Laporan | 1.150.000 | 2 Laporan | 1.265.000 | 2 Laporan | 1.391.500 | 2 Laporan | 1.530.650 | 10 Laporan | 6.337.150 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 006 003 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | terlaksananya kegiatan penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran | jumlah Laporan Realisasi Anggaran | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000 | 1 Laporan | 2.200.000 | 1 Laporan | 2.420.000 | 1 Laporan | 2.662.000 | 1 Laporan | 2.928.200 | 5 Laporan | 12.210.200 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 006 004 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun | jumlah laporan keuangan akhir tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000 | 1 Laporan | 2.750.000 | 1 Laporan | 3.025.000 | 1 Laporan | 3.327.500 | 1 Laporan | 3.660.250 | 5 Laporan | 15.262.750 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 006 008 | Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD | terlaksananya kegiatan penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD | Jumlah Dokumen Perencanaan | 5 Laporan | 5 Laporan | 9.800.000 | 5 Laporan | 10.780.000 | 5 Laporan | 11.858.000 | 5 Laporan | 13.043.800 | 5 Laporan | 14.348.000 | 25 Laporan | 59.829.800 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |
| 00 01 006 010 | Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah | terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan daerah | Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100.000.000 | 12 Bulan | 71.990.000 | 12 Bulan | 82.788.500 | 12 Bulan | 95.206.000 | 12 Bulan | 109.486.000 | 60 Bulan | 459.470.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|---------------|---|--|--|--|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | | | |
| 00 01 006 014 | Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 | terlaksananya kegiatan penetapan renstra SKPD tahun 2017-2022 | jumlah cetak dokumen renstra SKPD | 0 Buku | 10 Buku | 25.000.000 | 0 Buku | 0 | 0 Buku | 25.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Liwa | | |
| 00 01 006 015 | Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2022-2027 | terlaksananya kegiatan penyusunan rancangan renstra SKPD tahun 2022-2027 | Jumlah dokumen renstra OPD | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 30.000.000 | 1 Dokumen | 30.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| | | | TUJUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka | 0.96 % | 0,90 % | 1.212.338.000 | 0,85 % | 1.751.560.400 | 0,80 % | 1.847.799.500 | 0,75 % | 2.327.910.500 | 0,71 % | 2.472.417.700 | % | 9.612.026.100 | | | |
| | | | SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | menurunnya tingkat pengangguran terbuka | Tingkat pengangguran terbuka | 0.96 % | 0,90 % | 1.212.338.000 | 0,85 % | 1.751.560.400 | 0,80 % | 1.847.799.500 | 0,75 % | 2.327.910.500 | 0,71 % | 2.472.417.700 | % | 9.612.026.100 | | | |
| 02 | | | URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 01 | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 01 015 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja | persentase penurunan pengangguran terbuka | 0,96 % | 0,036 % | 821.938.000 | 0,048 % | 1.240.782.600 | 0,059 % | 1.353.445.500 | 0,059 % | 1.724.121.100 | 0,059 % | 1.868.250.700 | 0,059 % | 7.008.537.900 | | Lampung Barat | | |
| 02 01 015 006 | Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. | terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja | jumlah peserta latihan menjahit dan otomotif | 60 Orang | 60 Orang | 447.488.500 | 80 Orang | 662.182.600 | 100 Orang | 715.157.500 | 100 Orang | 922.370.100 | 100 Orang | 996.159.700 | 420 Orang | 3.743.358.400 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| 02 01 015 015 | Pelatihan Kewirausahaan | Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan | Jumlah peserta Pelatihan | 0 Kelompok | 1 Kelompok | 99.300.000 | 2 Kelompok | 183.600.000 | 2 Kelompok | 198.288.000 | 3 Kelompok | 316.751.000 | 3 Kelompok | 342.091.000 | 11 Kelompok | 1.140.030.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| 02 01 015 016 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja | terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana balai latihan kerja | Jumlah peralatan pelatihan Menjahit,Otomotif Serta Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga | 0 Set | 1 Set | 169.650.000 | 0 Set | 0 | 0 Set | 169.650.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| 02 01 015 017 | Pelatihan Sablon | Terlaksananya Pelatihan Sablon | Jumlah Peserta Pelatihan | 0 Orang | 15 Orang | 105.499.500 | 20 Orang | 155.000.000 | 20 Orang | 170.000.000 | 20 Orang | 185.000.000 | 20 Orang | 200.000.000 | 95 Orang | 815.499.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |
| 02 01 015 018 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja | Terlaksananya Pengadaan sarana BLK | Jumlah peralatan pelatihan Menjahit,Otomotif Serta Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga | 0 Set | 0 Set | 0 | 10 Set | 240.000.000 | 10 Set | 270.000.000 | 10 Set | 300.000.000 | 10 Set | 330.000.000 | 40 Set | 1.140.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat | | |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---------------|--|--|--|--|------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | |
| 02 12 016 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi | meningkatnya target investasi | jumlah ijin investasi PDM/PMA yang diterbitkan tepat waktu | 3 ijin | 3 ijin | 831.999.900 | 3 ijin | 611.947.550 | 4 ijin | 673.141.500 | 5 ijin | 740.455.650 | 5 ijin | 814.500.650 | 20 ijin | 3.672.045.250 | Lampung Barat |
| 02 12 016 010 | Penyelenggaraan Layanan Klinik Investasi | terlaksananya pelayanan klinik investasi | jumlah layanan klinik investasi | 0 Bulan | 12 Bulan | 99.300.000 | 0 Bulan | 0 | 12 Bulan | 99.300.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 016 011 | Pengendalian pelaksanaan penanaman modal | terlaksananya pengawasan pengendalian penanaman modal | jumlah laporan pengawasan pengendalian penanaman modal | 0 Laporan | 4 Laporan | 135.462.000 | 4 Laporan | 88.000.000 | 4 Laporan | 96.800.000 | 4 Laporan | 106.480.000 | 4 Laporan | 117.128.000 | 20 Laporan | 543.870.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 016 012 | Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | terlaksananya kegiatan operasional spipse | jumlah layanan spipse | 0 Kali | 3 Kali | 101.417.500 | 3 Kali | 90.002.550 | 4 Kali | 99.002.000 | 5 Kali | 108.902.200 | 5 Kali | 119.792.000 | 20 Kali | 519.116.250 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 016 013 | Promosi peluang investasi | terlaksananya promosi peluang investasi | jumlah pelaksanaan pameran promosi dan investasi daerah | 0 Kali | 2 Kali | 495.820.400 | 2 Kali | 279.795.000 | 2 Kali | 307.774.500 | 2 Kali | 338.551.950 | 2 Kali | 372.407.000 | 10 Kali | 1.794.348.850 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 016 015 | Penyelenggaraan Layanan Klinik Investasi dan Foila | Terlaksananya layanan klinik investasi dan foila | Jumlah Investor yang didampingi | 0 Investor | 0 Investor | 0 | 3 Investor | 154.150.000 | 4 Investor | 169.565.000 | 5 Investor | 186.521.500 | 5 Investor | 205.173.650 | 17 Investor | 715.410.150 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 018 | Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Tersedianya data potensi dan peluang investasi yang akurat | persentase data investasi yang valid | 100 % | 100 % | 371.735.000 | 100 % | 137.067.300 | 100 % | 60.854.000 | 100 % | 66.939.400 | 100 % | 73.633.000 | 100 % | 710.228.700 | Lampung Barat |
| 02 12 018 001 | Penyusunan Data Investasi dan Realisasi Perizinan | Terlaksananya penyusunan data investasi dan realisasi perizinan | Jumlah dokumen profil perizinan | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 50.550.000 | 1 Dokumen | 55.322.300 | 1 Dokumen | 60.854.000 | 1 Dokumen | 66.939.400 | 1 Dokumen | 73.633.000 | 5 Dokumen | 307.298.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 018 002 | Pemeliharaan dan Operasional Website | Terlaksananya pemeliharaan dan operasional website | jumlah pengunjung website | 0 Orang | 0 Orang | 96.050.000 | 0 Orang | 0 | 0 Orang | 96.050.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 02 12 018 003 | Fasilitasi Investasi dan Informasi Penanaman Modal | terlaksananya fasilitasi investasi dan informasi penanaman modal | Jumlah dokumen penanaman modal | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 225.135.000 | 0 Dokumen | 0 | 0 Dokumen | 225.135.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | | |
|--------------------------|--|--|---|--|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|----------------|--|-------------------|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | | |
| 02 12 018 006 | Sosialisasi RUPM | Terlaksananya sosialisasi RUPM | Jumlah peserta sosialisasi | 0 Orang | 0 Orang | 0 | 50 Orang | 81.745.000 | 0 Orang | 0 | 0 Orang | 0 | 0 Orang | 0 | 50 Orang | 81.745.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| TUJUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatnya kualitas layanan pemkab lampung barat | | indeks kepuasan masyarakat (IKM) | c Predikat | c Predikat | 2.373.449.600 | c Predikat | 1.916.118.900 | c Predikat | 1.399.228.100 | c Predikat | 1.515.149.300 | c Predikat | 1.640.660.400 | Predikat | 8.844.606.300 | | |
| SASARAN STRATEGIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | meningkatnya kualitas layanan perizinan terpadu | | indeks kepuasan masyarakat (IKM) | 70.56 (B) Predikat | 73 (B) Predikat | 2.373.449.600 | 76 (B) Predikat | 1.916.118.900 | 78 (B) Predikat | 1.399.228.100 | 79 (B) Predikat | 1.515.149.300 | 80 (B) Predikat | 1.640.660.400 | Predikat | 8.844.606.300 | | |
| 04 | URUSAN PENUNJANG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 05 | Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 05 046 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan | rata-rata kecepatan pelayanan perizinan | 5 Hari | 5 Hari | 1.413.201.600 | 3 Hari | 1.620.152.900 | 3 Hari | 1.073.666.000 | 3 Hari | 1.157.032.600 | 3 Hari | 1.246.733.800 | 3 Hari | 6.510.786.900 | | Lampung Barat |
| 04 05 046 002 | Operasional Pelayanan Izin | terlaksananya kegiatan operasional pelayanan izin | jumlah izin yang terbit | 430 ijin | 400 ijin | 287.634.000 | 400 ijin | 342.062.600 | 400 ijin | 376.268.000 | 400 ijin | 413.894.800 | 400 ijin | 455.283.000 | 2000 ijin | 1.875.142.400 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Kab Lampung Barat |
| 04 05 046 006 | Pengembangan pelayanan online | terlaksananya kegiatan pengembangan pelayanan online | Jumlah Fitur yang Dikembangkan | 0 Fitur | 2 Fitur | 283.400.000 | 0 Fitur | 0 | 2 Fitur | 283.400.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Kab Lampung Barat |
| 04 05 046 007 | Datang Investasi Langsung Konstruksi (Diskon) | terlaksananya kegiatan datang investasi langsung konstruksi (DISKON) | Jumlah layanan datang investasi langsung konstruksi | 0 Bulan | 12 Bulan | 544.090.600 | 12 Bulan | 544.090.600 | 12 Bulan | 220.000.000 | 12 Bulan | 220.000.000 | 12 Bulan | 220.000.000 | 60 Bulan | 1.748.181.200 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 04 05 046 008 | Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | terlaksananya kegiatan pemutihan izin mendirikan bangunan IMB | jumlah lokasi pemutihan IMB | 3 Kec | 3 Kec | 157.359.000 | 3 Kec | 106.709.900 | 3 Kec | 117.380.000 | 3 Kec | 129.118.000 | 3 Kec | 142.029.800 | 15 Kec | 652.596.700 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Kab Lampung Barat |
| 04 05 046 009 | Operasional Tim Kerja Teknis Perizinan Kabupaten Lampung Barat | terlaksananya operasional tim kerja teknis perizinan kabupaten lampung barat | Jumlah bulan operasional Tim Teknis Perizinan | 0 ijin | 400 ijin | 140.718.000 | 400 ijin | 127.289.800 | 400 ijin | 140.018.000 | 400 ijin | 154.019.800 | 400 ijin | 169.421.000 | 2000 ijin | 731.466.600 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |
| 04 05 046 011 | Operasional Satgas Percepatan Berusaha | Terlaksananya operasional satgas percepatan perizinan | Jumlah Peraturan Perizinan | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 0 | 1 Dokumen | 500.000.000 | 1 Dokumen | 220.000.000 | 1 Dokumen | 240.000.000 | 1 Dokumen | 260.000.000 | 4 Dokumen | 1.220.000.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | Lampung Barat |

| Kode | Tujuan/Sasaran Urusan/Bidang Program dan Kegiatan | Sasaran Program/kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program dan Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi | |
|---------------|---|--|--|--|------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra | | |
| | | | | | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | Target | Pagu Indikatif | |
| 04 05 049 | Program Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaku Usaha | Meningkatnya kualitas pengawasan perizinan | persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perizinan | 12 % | 20 % | 960.248.000 | 25 % | 295.966.000 | 30 % | 325.562.100 | 35 % | 358.116.700 | 50 % | 393.926.600 | 50 % | 2.333.819.400 | Lampung Barat |
| 04 05 049 001 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Izin Usaha | terlaksananya dan evaluasi pelaksanaan izin usaha | jumlah laporan monev | 1 Laporan | 4 Laporan | 71.030.000 | 4 Laporan | 45.133.000 | 4 Laporan | 49.646.300 | 4 Laporan | 54.610.000 | 4 Laporan | 60.071.000 | 20 Laporan | 280.490.300 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 04 05 049 002 | Rapat Koordinasi Perizinan | terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perizinan | jumlah rapat koordinasi perizinan | 4 Kali | 4 Kali | 63.950.000 | 4 Kali | 31.748.200 | 4 Kali | 34.923.000 | 4 Kali | 38.415.300 | 4 Kali | 42.256.000 | 20 Kali | 211.292.500 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 04 05 049 005 | Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terhadap Masyarakat | terlaksananya kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan terhadap masyarakat | Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi | 5 Lokasi | 5 Lokasi | 770.988.000 | 5 Lokasi | 159.376.800 | 5 Lokasi | 175.314.000 | 5 Lokasi | 192.845.400 | 5 Lokasi | 212.129.000 | 25 Lokasi | 1.510.653.200 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 04 05 049 007 | Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Data IMB | terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi inventarisasi data IMB | Jumlah Laporan Monev | 0 Laporan | 4 Laporan | 54.280.000 | 0 Laporan | 0 | 4 Laporan | 54.280.000 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| 04 05 049 008 | Inventarisasi Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | Terlaksananya inventarisasi data IMB | Jumlah Laporan Data IMB | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 | 1 Laporan | 59.708.000 | 1 Laporan | 65.678.800 | 1 Laporan | 72.246.000 | 1 Laporan | 79.470.600 | 4 Laporan | 277.103.400 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| TOTAL | | | | | | 6.485.596.900 | | 5.292.056.850 | | 4.862.294.550 | | 5.639.565.850 | | 6.142.179.100 | | 28.421.693.250 | |

RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL,PTSP DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2018-2022

| Uraian Renstra | Output Renstra | Target 2018 | Target 2019 | Target 2020 | Target 2021 | Target 2022 | Pagu 2018 | Pagu 2019 | Pagu 2020 | Pagu 2021 | Pagu 2022 |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| Program : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan Unit Kompetensi | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 6 Jenis | 722.638.000 | 1.302.554.400 | 948.350.000 | 1.200.424.200 | 1.434.753.210 | |
| Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kabupaten/Kota | 60 Orang | 80 Orang | 100 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 552.988.000 | 878.954.400 | 480.062.000 | 769.719.200 | 853.715.110 | |
| Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pelatihan Kerja yang tersedia | 10 Jenis | 10 Jenis | 10 Jenis | 10 Jenis | 169.650.000 | 240.000.000 | 270.000.000 | 113.954.000 | 248.947.100 | |
| Program : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Pencari Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan Pekerjaan | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kartu Antar Kerja (AK1) yang diterbitkan | 900 Kartu | 1000 Kartu | 1200 Kartu | 1250 Kartu | 1300 Kartu | 28.700.000 | 35.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | 43.000.000 |
| Pelayanan antar Kerja | Jumlah AK 1 Yang terbit | 900 Kartu | 1000 Kartu | 1200 Kartu | 1250 Kartu | 1300 Kartu | 28.700.000 | 35.000.000 | 38.000.000 | 40.000.000 | 43.000.000 |
| Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | Jumlah Media Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 4 Media | 28.700.000 | 28.130.100 | 64.637.000 | 72.637.000 | 79.637.000 | |
| Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan | 36 Lowong Pekerjaan | 28.700.000 | 28.130.100 | 64.637.000 | 72.637.000 | 79.637.000 |
| Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi PMI | 5 Kali | 99.300.000 | 122.339.600 | 90.403.000 | 133.780.300 | 143.780.300 |
| Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | Jumlah rekom ID Calon Migran Indonesia yang terbit | 25 Rekom | 25 Rekom | 30 Rekom | 30 Rekom | 35 Rekom | 99.300.000 | 122.339.600 | 90.403.000 | 133.780.300 | 143.780.300 |
| Program : PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program : Persentase Perusahaan yang menerapkan Keselamatan,Kesehatan Kerja (K3) | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah | Jumlah Monev Perusahaan yang Beroperasi di lampung Barat | 15 Perusahaan | 333.000.000 | 259.308.100 | 285.238.000 | 313.761.800 | 345.137.000 |
| Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perselisihan yang dapat diselesaikan | 2 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 0 Kasus | 63.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan | 1 Dokumen | 210.000.000 | 164.450.000 | 180.895.000 | 198.984.500 | 218.882.000 |
| Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penetapan UMK | 1 Dokumen | 0 | 94.858.100 | 104.343.000 | 114.777.300 | 126.255.000 |

| Indikator Program : Persentase Realisasi Investasi | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Pelaku usaha yang patuh terhadap peraturan terkait Pelaksanaan Penanaman Modal | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 960.248.000 | 295.966.000 | 325.562.100 | 326.122.000 | 163.000.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 5 kali | 5 kali | 5 kali | 10 kali | 5 kali | 198.000.000 | 45.000.000 | 51.000.000 | 48.300.000 | 25.000.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Peserta Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal | 162 Orang | 162 Orang | 162 Orang | 234 Orang | 120 Orang | 420.000.000 | 155.000.000 | 165.000.000 | 96.600.000 | 48.000.000 |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Laporan Pengawasan Penanaman Modal | 9 kali | 9 kali | 10 kali | 20 kali | 10 kali | 342.248.000 | 95.966.000 | 109.562.100 | 181.222.000 | 90.000.000 |
| Program : PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | 1 Dokumen | 371.735.000 | 137.067.300 | 60.854.000 | 34.000.000 | 37.400.000 |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Junlah Buku Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan Nonperizinan | 45 Eksemplar | 371.735.000 | 137.067.300 | 60.854.000 | 34.000.000 | 37.400.000 |
| NON URUSAN | | | | | | | | | | | |
| Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | |
| Indikator Program : Jumlah Bidang Urusan yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang | 22 Dokumen | 34.437.600 | 27.638.000 | 31.187.200 | 31.313.700 | 35.348.280 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD | 4 Dokumen | 2.858.000 | 2.858.000 | 2.858.000 | 2.858.000 | 3.143.800 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah RKA | 1 Dokumen | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah RKA Perubahan | 1 Dokumen | 1.442.000 | 1.822.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.750.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah DPA | 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah DPA Perubahan | 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.750.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Dokumen | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.265.000 | 1.391.500 | 1.530.650 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun | 10 Dokumen | 23.637.600 | 15.708.000 | 18.064.200 | 18.064.200 | 20.773.830 |
| Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun | 3 Dokumen | 2.898.632.217 | 3.188.545.439 | 3.507.399.983 | 3.858.139.981 | 4.243.953.979 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah PNS yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya | 26 Orang | 2.893.132.217 | 3.182.445.439 | 3.500.689.983 | 3.850.758.981 | 4.235.834.879 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir | 1 Dokumen | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.025.000 | 3.327.500 | 3.660.250 |
| Akhir Tahun SKPD | Tahun yang disusun | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun | 1 Dokumen | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.265.000 | 1.391.500 | 1.530.650 |
| Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis | Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun | 1 Dokumen | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.420.000 | 2.662.000 | 2.928.200 |
| Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan : Administrasi Kepegawai | Jumlah pegawai yang dilaksanakan Administrasi | 2 Orang | 25.000.000 | 11.500.000 | 13.225.000 | 15.208.000 | 17.489.000 |
| Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi | 2 Orang | 25.000.000 | 11.500.000 | 13.225.000 | 15.208.000 | 17.489.000 |
| Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah sub organisasi yang disediakan Administrasi | 4 Sub Organisasi | 367.061.400 | 358.397.000 | 389.921.850 | 271.175.950 | 363.927.670 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruangandan Kantor | Jumlah jenis komponen listrik yg disediakan | 10 Jenis | 2.551.000 | 2.806.000 | 3.086.000 | 3.394.000 | 3.733.000 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 3 Jenis | 93.500.000 | 75.314.000 | 66.345.400 | 66.345.400 | 72.979.000 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis cetak dan jenis penggandaan | 7 Jenis | 31.420.000 | 32.000.000 | 35.200.000 | 38.720.000 | 42.592.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Umum | Jumlah SKHU (Surat Kabar Harian Umum) | 4 SKHU | 4 SKHU | 4 SKHU | 5 SKHU | 5 SKHU | 3.960.000 | 4.554.000 | 5.009.000 | 5.509.000 | 6.335.350 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis penyediaan makanan dan minuman tamu | 12 Kali | 10.130.400 | 6.732.000 | 7.741.800 | 7.741.800 | 8.903.070 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Konsultasi SKPD | Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan | 30 kali | 225.500.000 | 236.991.000 | 272.539.650 | 149.465.750 | 229.385.250 |
| Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 3 Jenis | 799.450.000 | 173.692.700 | 108.560.500 | 119.416.850 | 131.358.000 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang diadakan | 4 Unit | 3 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 0 Unit | 698.100.000 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah mebel yang diadakan | 1 Unit | 25 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 10 Unit | 77.350.000 | 85.085.000 | 93.593.500 | 102.952.850 | 113.248.000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan | 2 Set | 24.000.000 | 13.607.700 | 14.967.000 | 16.464.000 | 18.110.000 |
| Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4 Sub Organisasi | 248.229.400 | 115.229.000 | 130.581.400 | 209.467.850 | 210.366.500 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar | 1127 Surat | 4.000.000 | 4.600.000 | 5.290.000 | 5.819.000 | 6.400.900 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Rekening/ID Pelanggan | 4 Rekening | 19.800.000 | 18.480.000 | 20.328.000 | 22.360.800 | 24.596.000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa pelayanan umum Kantor | 4 Sub Organisasi | 224.429.400 | 92.149.000 | 104.963.400 | 181.288.050 | 179.369.600 |

| Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | 3 Jenis | 216.396.000 | 182.806.000 | 201.085.500 | 221.193.650 | 243.311.700 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraannya | 11 Kendaraan | 4.250.000 | 4.675.000 | 5.142.500 | 5.656.750 | 6.222.000 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaannya dan Pajak | 11 Kendaraan | 126.336.000 | 113.999.500 | 125.399.000 | 137.938.900 | 151.732.000 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 8 Unit | 10.810.000 | 12.431.500 | 13.674.000 | 15.041.000 | 16.545.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi | 2 Gedung | 75.000.000 | 51.700.000 | 56.870.000 | 62.557.000 | 68.812.700 |